



Analisis Pengaruh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Novieka Wahyu Putri Rusdaryanti¹, Marseto², Fauzatul Laily Nisa³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 18 September 2023

Revised : 27 September 2023

Accepted: 02 Oktober 2023

An assistance program from the government to the community called Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) aims to help low-income communities (MBR) as well as to improve their welfare. Funds from this program can be used to buy materials and pay the salaries of their workers. The purpose of this research is to understand how the impact of the BSPS program has on economic growth in Ponorogo Regency. The home improvement program is the general name for this BSPS program. The community can improve their welfare and housing conditions with the help of this program. Thus, the social and economic impact of this assistance program underwent many changes.

Keywords: *BSPS Program; Livable Houses; Economic Growth*

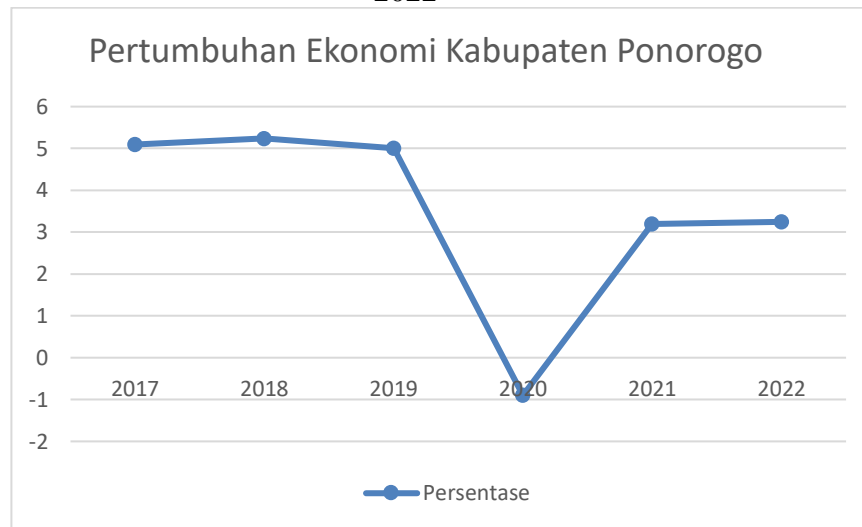
(*) Corresponding Author: viekardy@gmail.com

How to Cite: Rusdaryanti N W P, Marseto, & Nisa F L. (2023). Analisis Pengaruh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8433991>

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada awalnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan (Agustino, 2008). Untuk mendukung perkembangan pertumbuhan perekonomian pemerintah perlu melakukan penanganan terkait masalah kemiskinan. Pemerintah juga sudah memiliki tiga strategi yang digunakan dalam pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyelenggarakan program inpres desa tertinggal. Kedua, mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan akses kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sanitasi, Pendidikan dan lain sebagainya. Ketiga, melakukan pembangunan pada segi infrastruktur ekonomi pada setiap daerah.

Apabila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2020 dikarenakan pertumbuhan ekonomi angkanya tercatat minus 0.90 persen karena penyebab utamanya yaitu adanya pandemic covid-19. Akan tetapi pada tahun 2021 hingga tahun 2022 pertumbuhan ekonomi nya sudah kembali naik karena kondisi perekonomian sudah mulai kembali stabil. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Ekonomi di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2017-2022

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022

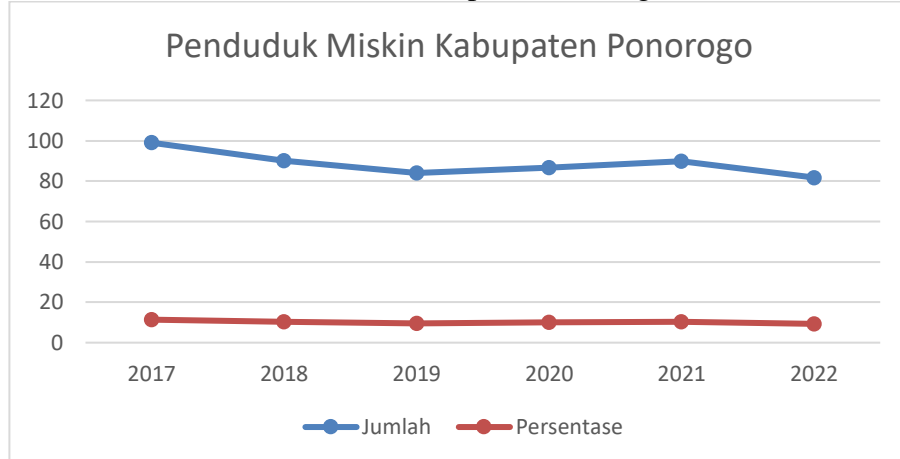
Pembangunan ekonomi akan maju apabila dapat menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pemerataan sumber daya ekonomi (Damsar, 2009). Menurunnya angka kemiskinan yaitu suatu tujuan dari SDGs (Sustainable Development Goals) dengan melakukan pemberantasan kemiskinan serta kelaparan. Selain itu, Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki empat tujuan utama, yaitu pembangunan yang dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi penduduk secara terus-menerus, pembangunan yang dapat menjamin keberhasilan kegiatan sosial masyarakat, pembangunan yang meningkatkan taraf hidup sekitar, dan pembangunan yang merasakan keadilan serta keberhasilan pengelolaan dalam meningkatkan kualitas hidup pada generasi selanjutnya.

Permasalahan utama di Kabupaten Ponorogo masih berkaitan dengan kemiskinan. Dengan tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa program penurunan angka kemiskinan belum terealisasi dengan baik. Tingkat kemiskinan pada suatu daerah pada sebenarnya dapat diketahui secara langsung melalui kondisi pada keadaan rumahnya, oleh karena itu biasanya program penurunan angka kemiskinan berpusat pada nilai kepemilikan rumah masyarakat. Sehingga, pemerintah mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan dana untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rumah yang layak huni. Selain itu, dengan keberadaannya program ini diingkan dapat menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi dan dapat mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan aspek ekonomi kemiskinan berarti kurangnya sumberdaya yang digunakan dalam mencukupi kebutuhan hayati dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya yang disebutkan disini mencakup berbagai aspek meliputi aspek finansial dan berbagai macam hal yang dapat menciptakan kesejahteraan. Dengan hal ini, maka penilaian kemiskinan bisa dilakukan secara

langsung melalui sumber daya yang tersedia yang biasanya disebut dengan garis kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan berbagai permasalahan, yang tidak hanya berkaitan dengan keadaan ekonomi namun dengan keadaan sosial, budaya serta politik (Dewanta, 1999).

Tabel 2. Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwasannya pada tahun 2017-2019, persentase penduduk miskin Kabupaten Ponorogo selalu mengalami penurunan. Akan tetapi, pada tahun 2020 kembali naik menjadi 9,95 persen. Dan ditahun 2021 juga tetap mengalami kenaikan menjadi 10,26 persen. Namun pada tahun 2022 persentase jumlah penduduk miskin kembali menurun pada angka 9,32 persen.

Dalam mengatasi penurunan angka kemiskinan pemerintah di Kabupaten Ponorogo mengadakan berbagai program, antara lain Jamkesmas, raksin, program perbaikan rumah, dan lainnya. Sebuah program terbaik di Kabupaten Ponorogo yaitu program bedah rumah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Pasal 53 tentang Perumahan dan Permukiman, yang dikeluarkan oleh Kebijakan Dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman Tahun 2020-2024, dalam memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan perumahan masyarakat sesuai dengan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dirjen Perumahan dan Permukiman Tahun 2020-2024 berdasarkan kebijakan dan programnya diantaranya ditujukan pada:

- Meningkatkan perbaikan rumah serta permukiman berbasis swadaya masyarakat,
- Memperluas program dan inisiatif pemberdayaan masyarakat untuk menyediakan perumahan yang layak,
- Pemerintah daerah mengembangkan keahlian dalam perbaikan perumahan,
- Mengembangkan peran sumber daya manusia dan pelaku dalam membangun perumahan dan permukiman.

Pemerintah bertanggung jawab untuk melengkapi dan menyediakan fasilitas bagi penerima bantuan untuk memperoleh rumah layak huni, sehat, aman, serta tenteram terkait upaya mewujudkan hunian yang layak untuk masyarakat. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah menawarkan

program bantuan untuk pembangunan atau pemeliharaan rumah. Salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang meningkatkan kualitas rumah sekaligus memberikan bantuan pembangunan. BSPS adalah program pemerintah yang memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki kondisi rumahnya atau membangun yang baru.

KAJIAN TEORITIS

Pemerintah selalu memikirkan bagaimana cara-cara baru untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo menggunakan beberapa program yang dapat meningkatkan kemakmuran penduduk. Karena dengan keberhasilannya suatu daerah dan keberhasilan pemerintah ditandai dengan keberhasilan dalam mensejahterahkan masyarakat melalui program-program yang diadakan oleh pemerintah, yang melibatkan berbagai sektor untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Saputra, T dkk, 2023).

Sari Wulandari et al, 2022 dalam penelitiannya menyampaikan bahwa dalam mengatasi kemiskiknan dapat melalui dua hal. Yang pertama yaitu melalui kebijakan tak langsung yang diarahkan pada kondisi yang dapat melangsungkan suatu kegiatan dalam menaggulangi kemiskinan seperti pada hal sosial politik. Yang kedua yaitu melalui kebijakan langsung ditujukan pada hal yang meningkatkan sumber daya manusia, dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan lainnya.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006) dalam (Nartin & Musin, 2022), menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kesejahteraan yang ditandai dengan kepemilikan rumah yang layak, kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, pendidikan dan kesehata n, atau suatu kondisi seseorang yang dapat mencukupi segala kebutuhannya. Sedangkan, menurut (Zaman Nur. dkk, 2021) Kesejahteraan sosial yaitu suatu program atau layanan yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Bappenas, 2007) dalam mengatasi kemiskinan dapat dibagi melalui dua program. Program pertama merupakan suatu program yang terdiri dari beraneka agenda yang difokuskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Apabila program ini berjalan dengan lancar, maka program ini sangat bermanfaat untuk MBR. Contoh dari program ini antara lain bantuan berupa beras, bantuan langsung tunai, dan jaminan kesehatan. Sedangkan, program kedua merupakan suatu program yang tidak hanya ditujukan kepada MBR tetatpi juga diberikan kepada semua masyarakat yang memiliki pendapatan. Contoh dari program ini antara lain pengurangan biaya sekolah, penyediaan dana pelayanan kesehatan, dan bantuan tempat tinggal yang layak.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengutarakan ketentuan tentang pembangunan rumah swadaya berupa Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 6/Permen/M/2006 tentang Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kridit/Pembiayaan Mikro Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2013 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui peraturan tersebut

berdasarkan visinya dijelaskan bahwasannya pemerintah menyerahkan bantuan dana terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna mengembangkan kondisi/keadaan rumah awalnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Diharapkan peraturan ini mampu menjadikan salah satu program bantuan yang tepat pada sasaran.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yaitu dengan meningkatkan infrastruktur pada kawasan permukiman masyarakat. Sehingga dengan adanya program BSPS atau bedah rumah rumah ini menjadi suatu agenda pemerintah yang didirikan untuk dapat menolong masyarakat dalam membangun atau membenahi rumah masyarakat tidak layak huni. Selain itu, program ini juga menjadi program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

METODE

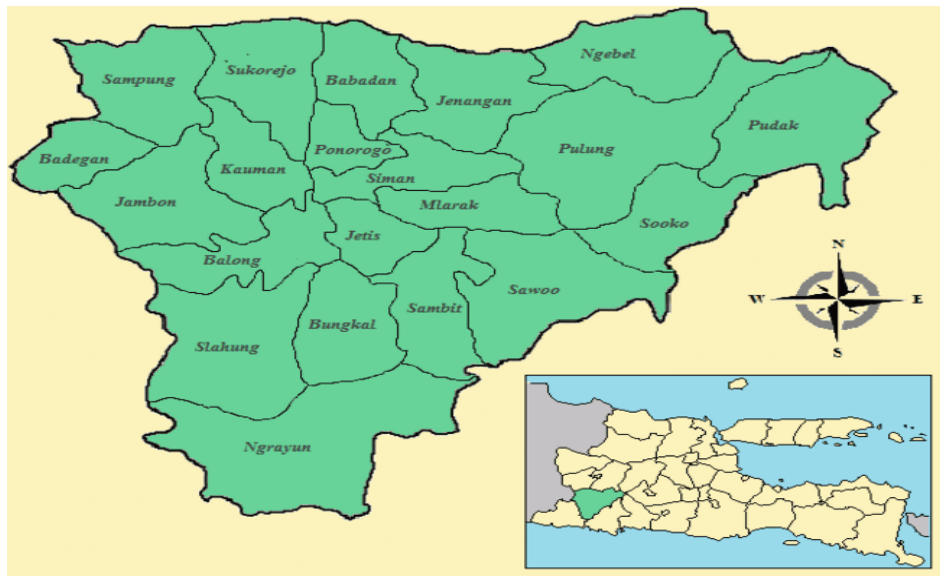
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif berarti suatu jenis metode yang digunakan oleh seseorang dalam melakukan sebuah penelitian pada jangka waktu tertentu dengan mengumpulkan berbagai informasi terkait suatu kondisi yang terjadi (Kamal Ma'ruf, 2012).

Peneliti menggunakan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif dalam pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti memakai data primer dan sekunder saat mengumpulkan data yang telah dilakukan. Berbeda dengan data sekunder yang dikerahkan lewat pengamatan dan dokumentasi, data primer dikumpulkan melalui wawancara dan percakapan. Dengan menggunakan data yang sudah dikumpulkan, berikutnya akan dilaksanakan asifikasi data yang sedemikian rupa sesuai dengan jenis data yang digunakan sampai menghasilkan data yang tersusun secara sistematis.

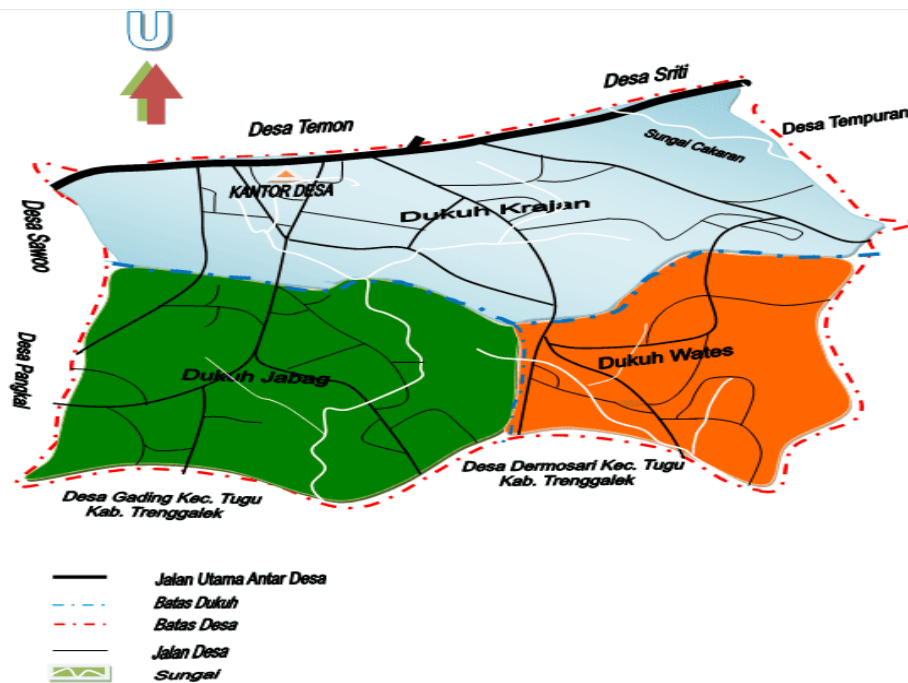
Dalam penelitian lokasi tempat peneliti berada di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Survei ini dilakukan pada para penerima bantuan program bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS). Jangka penelitian dilakukan kurang lebih 4 bulan yaitu pada bulan maret – juni 2023. Informan pada peneliti ini yaitu tenaga fasilitator lapangan (TFL) dan coordinator kabupaten (Korkab) dan informan pendukungnya yaitu penerima bantuan program BSPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.398 Penerima Bantuan (PB). Lokasi tersebut berada pada desa yang tingkat kejahteraannya rendah atau sedang. Berdasarkan lokasi peneliti Desa tempuran merupakan daerah pegunungan masih banyak warga yang berkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk keberhasilan program ini tidak hanya dukungan dari pemerintah, akan tetapi juga butuh partisipasi dari masyarakat untuk melancarkan program ini dan menjadikan kondisi lingkungan rumah yang menjadi lebih baik kualitasnya.



Gambar 1. Peta Kabupaten Ponorogo



Gambar 2. Peta Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah suatu program berupa uang bantuan yang diserahkan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh pemerintah guna mengembangkan kualitas hunian masyarakat. MBR merupakan masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah guna menyediakan rumah yang layak huni. Dengan bantuan program ini, masyarakat setempat mengharapkan akan dibantu untuk mengubah rumah mereka yang tidak layak menjadi tempat tinggal yang layak huni yang diakomodasi oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program BSPS merupakan bantuan berupa uang sebesar Rp 20.000.000 yang dipergunakan untuk membeli bahan material sebesar Rp 17.500.000 dan untuk upak tukang/pekerja sebesar Rp 2.500.000.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Koordinator Kabupaten (Korkab), beliau menjelaskan bahwasannya penyaluran dana bantuan langsung disalurkan kedalam rekening penerima bantuan, dalam penggunaan uang tersebut harus didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan (TFL). Dalam penggunaan dana pembelian bahan material, material yang digunakan harus sesuai SNI dan untuk harganya harus sudah disepakati oleh Pihak Pembuat Komitmen (PPK).

Adapun kriteria calon penerima bantuan, antara lain:

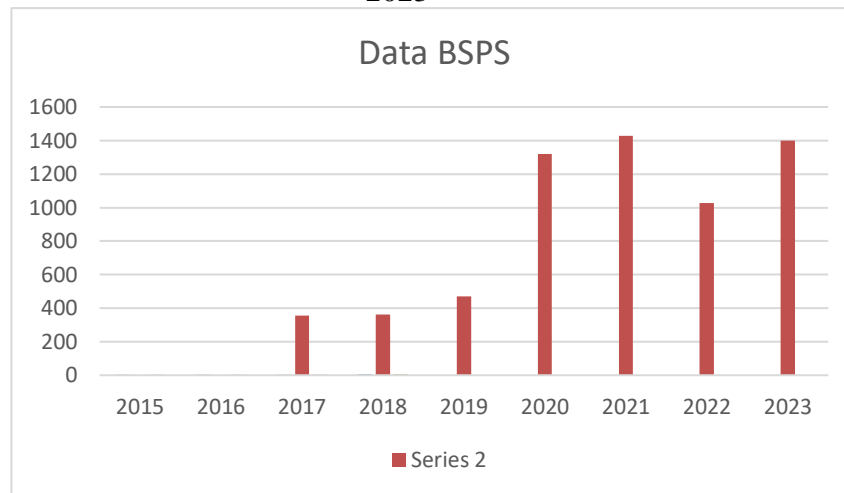
- a. WNI yang sudah berkeluarga,
- b. Memiliki hak tanak yang sah atau kepemilikan sendiri didukung dengan dokumentasi surat-surat, seperti sertifikat tanah,
- c. Belum mempunyai rumah yang kondisinya layak huni,
- d. Sebelumnya tidak pernah menerima bantuan program perumahan atau program bantuan sejenisnya,
- e. Masyarakat berpenghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP),

Pengaruh Program BSPS Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Program BSPS merupakan pembangunan rumah bersifat swadaya, yaitu pembangunan rumah yang dibangun dengan partisipasi atau gotong royong masyarakat sekitar. Dengan program BSPS ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan rumah masyarakat menjadi layak huni. Selain itu, diharapkan program ini dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

Berdasarkan pendapat salah satu penerima bantuan selaku ketua penerima bantuan yaitu Bapak Imam Fatoni yang peneliti temui di tempat kediamannya. Beliau berkata, “program ini sangat membantu untuk masyarakat Desa Tempuran karena dengan adanya program ini kita dapat memperbaiki rumah dan mendapatkan rumah yang layak huni, selain itu juga saya berharap pemerintah dapat terus mengadakan program ini, dikarenakan program ini memiliki banyak manfaat, khususnya yang sudah saya rasakan yaitu saya beserta keluarga dapat tinggal ditempat yang lebih layak huni”.

Program BSPS merupakan salah satu program yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian, selain itu juga memiliki dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Program BSPS ini sudah ada di Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2017 hingga saat ini. Dengan demikian, membuktikan bahwasannya program ini mampu menurunkan angka kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan tempat tinggal layak. Disisi lain, dengan adanya program ini juga dapat memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat pengangguran, sehingga dengan adanya penurunan angka pengangguran juga dapat menurunkan angka kemiskinan dan mengakibatkan perkembangan pada pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3. Data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2015-2023

Sumber: Data BSPS Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan tabel diatas, program BSPS atau biasanya yang disebut dengan program bedah rumah dari tahun 2015 hingga tahun 2021 selalu mengalami kenaikan secara signifikan. Akan tetapi, pada tahun 2022 mengalami penurunan, disebabkan oleh terdapat masyarakat yang lainnya yang mendapatkan program bantuan sejenisnya. Namun, pemerintah konsisten dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dengan melakukan pembangunan rumah-rumah yang tidak layak huni. Hal ini dibuktikan dengan melihat grafik tahun 2023 yang mengalami peningkatan kembali.

Meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan tetapi program ini masih memberikan dampak positif yaitu kemiskinan menurun yang ditandani dengan menurunnya tingkat rumah yang tidak layak huni. Selain itu, juga memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan angka kemiskinan menurun. Hal tersebut dibuktikan secara langsung oleh peneliti melalui kunjungan lapangan ke tempat tinggal para penerima bantuan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan semula rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni semenjak adanya program BSPS, yang artinya program ini juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat.



Gambar 3. Kondisi rumah sebelum dan sesudah adanya Program BPS

Dengan adanya program BPS yakni program pembangunan kualitas rumah layak huni memberikan pengaruh terhadap kualitas bangunan khususnya pada kawasan pemukiman masyarakat. Selain itu, program ini juga memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat karena dengan adanya program bantuan ini masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang layak huni.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mampu memberikan kesimpulan bahwasanya kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Ponorogo. Dalam menurunkan angka kemiskinan ini pemerintah menawarkan berbagai program untuk masyarakat. Salah satunya yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan tersedianya program ini Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan pada angka kemiskinan. Meskipun pada tahun 2020 dan tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan dikarenakan adanya covid-19 menyebabkan penyaluran bantuan dana juga dialokasikan untuk penanganan covid-19. Akan tetapi, ketika kondisi sudah stabil kembali pada tahun 2022 kemiskinan kembali menurun dikarenakan dana bantuan sudah mulai dikhususkan kembali pada program BSPS.

Program bantuan dana ini dirancang pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas bangunan rumah terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak huni yang didasari dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk menjadikan rumah yang sehat, aman, dan terjangkau, juga diperlukan dukungan dari masyarakat. Dengan adanya program ini masyarakat sangat berperan aktif dalam proses pembangunan dengan memberikan keswadayaan masyarakat dan saling gotong royong untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Program BSPS ini memberikan dampak positif bagi MBR karena

dengan adanya program ini MBR dapat mempunyai rumah yang layak huni. Selain itu, melalui adanya program BSPS ini dapat menurunkan angka kemiskinan sehingga dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi

SARAN

Di Kabupaten Ponrogo khususnya Desa Tempuran masyarakatnya masih belum memahami mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), meskipun program ini sudah tersedia pada Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2017, dan sebelumnya program ini dikenal sebagai program bedah rumah. Masyarakat Desa Tempuran hanya mengetahui bahwasannya program ini ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu, akan tetapi mereka belum mengetahui kategori masyarakat yang mendapatkan program BSPS tersebut. Sehingga, hal ini masih diperlukan perhatian dari pemerintah dalam mensosialisasikan program tersebut secara jelas dan rinci serta mudah dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hara, K. M. (2020). Pengaruh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Masyarakat di Kelurahan Lowulowu Kecamatan Lealea Kota Baubau. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 5(2), 73–81. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v5i2.541>
- Hariyani, T. (2016). Dampak Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 2(2), 77–99.
- Kamal Ma'ruf. (2012). *IMPLEMENTASI BSPS (BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA) DI KECAMATAN CIKAUM KABUPATEN SUBANG*. *Kolisch 1996*, 49–56.
- Safarizki, H. A., & Ristanto, I. (2021). Dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2020. *Prosiding CEEDRiMS 2021 : Inovasi Teknologi Dan Material Terbarukan Menuju Infrastruktur Yang Aman Terhadap Bencana Dan Ramah Lingkungan*, 199–203.
- Saputra Uin, J., Thaha, S., & Jambi, S. (2022). Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 6(1), 241–249.
- Sjafari, A. (2023). *Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang*. 16(1), 1–13.